

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah**

Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Republik Indonesia, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-046/A/JA/12/2011 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)

Terintegrasi dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Republik Indonesia, UU No.19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia, Perpres No. 102 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **Buku**

Fuady, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1, Depok,

Kurniawan, Ardeno, 2018, *Korupsi: Membuka Pandora Box, Perilaku Korup dari Dimensi Etika, Budaya dan Keperilakuan*, Penerbit ANDI, Edisi 1, Yogyakarta.

Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Cetakan Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Salim, dan Erlis S.N, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Waluyo, Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta

Waluyo, Bambang, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta

Yahya Harahap, M, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

### **Karya Ilmiah/Jurnal**

Bahreisy, Budi, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi", Vol. 15, No. 2, Juli 2018, Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia

*Indonesia Corruption Watch*, "Hasil Pemantauan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020 "Koruptor Merajarela, Hukuman Tak Kunjung Beri Efek Jera" Rata-Rata Hukuman Koruptor Hanya 3 Tahun 1 Bulan Penjara",

[https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Hasil%20Pemantauan%20Persidangan%20Perkara%20Tindak%20Pidana%20Korupsi%20Tahun%202020\\_FINAL.pdf](https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Hasil%20Pemantauan%20Persidangan%20Perkara%20Tindak%20Pidana%20Korupsi%20Tahun%202020_FINAL.pdf), diakses pada 9 April 2021 pukul 17.22 WIB

- Narindrani, Fuzi “*Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice*”, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020
- Nur Martiandika Putra, Riptia *Batas Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Melakukan Penyadapan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, 2020
- Laurencia, Tamara, “Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Due Process of Law”, Jurnal Mercatoria, Vol. 12, No. 2, Desember 2019, Surabaya: Universitas Surabaya
- Mashyudi, “Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *JH Ius Qua Iustum*, Vol. 2, Issue 1. Januari 2019, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Piadi, Yusona Rida Ista Sitepu, *Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, 2019, Sukabumi, Universitas Nusa Putra, 2019
- Ratna Sari, H, Diah, “Laporan Penelitian Due Process Of Law dalam KUHP di Indonesia”, Fakultas Hukum Udayana, Januari 2017.
- Suyatmiko, Wawan dan Nicola, Alvin. “Inisiatif Penguatan Lembaga Antikorupsi Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019”. *Transparency International Indonesia (TII)*

### **Lain-lain**

- Arsil, “Kewenangan Jaksa Melakukan Penyelidikan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569927199518f/kewenangan-jaksa-melakukan-penyelidikan/>, diakses pada Senin, 1 Maret 2021, pukul 23.27 WIB
- Arsyad, Edy, “Kejagung dan Polri Tak Boleh Tolak KPK” <https://fajar.co.id/2020/11/02/kejagungdanpolritakbolehtolakkpk/?page=all>, diakses pada 14 Januari 2021, pukul 23.17 WIB
- BPHN, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset CNN Indonesia, Kronologi Jaksa Pinangki Bertemu Djoko Tjandra di Malaysia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200930173427-12-552848/kronologi-jaksa-pinangki-bertemu-djoko-tjandra-di-malaysia>, diakses pada 29 Juli 2021, pukul 16.51 WIB.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal, *Saat KPK dan Kejagung "Berebut" Menangani Kasus Jaksa Pinangki...*, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/28/090500865/saat-kpk-dan-kejagung-berebut-menangani-kasus-jaksa-pinangki-?page=all>, diakses pada 29 Juli 2021, pukul 17.07 WIB.
- Gunadha, Reza dan Welly H, “6 Bulan Pertama 2019, KPK Selamatkan Uang Negara Rp 28,7 Triliun”, <https://www.suara.com/news/2019/09/20/184620/6-bulan-pertama-2019-kpk-selamatkan-uang-negara-rp-287-triliun?page=1>, diakses pada Sabtu 14 November 2020, pukul 7.28 WIB
- Halim, Devina, “Juliari Batubara Jadi Tersangka, Total 4 Menteri di Era Jokowi yang Tersandung Kasus Dugaan Korupsi”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/09231651/juliari-batubara-jadi-tersangka-total-4-menteri-di-era-jokowi-yang?page=all>, diakses pada Minggu, 6 Desember 2020 pukul 14.25 WIB

- Hendry Campbell Black. *Black's Law Dictionary* (St. Paul. Minn.: West Publishing Co. 11th reprint. 1997)
- Jurnaliston, Reza, “Polri klaim selamatkan uang hasil korupsi Rp2,2 T selama 2018”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/27/16405081/tahun-2018-polri-klaim-selamatkan-uang-negara-rp-23-triliun>, Diakses pada Kamis, 12 November 2020 Pukul 11.35 WIB
- Kejaksaan.go.id, “Capaian Kinerja Kejaksaan RI Sepanjang Tahun 2019”, <https://www.Kejaksaan.go.id/berita.php?idu=&id=14972>, diakses pada Sabtu, 14 November 2020, Pukul 06.44 WIB
- Kejaksaan.go.id, “Rekapitulasi Data Capaian Kinerja Penanganan Perkara TP. Korupsi Periode Bulan Januari s.d Maret 2018”, [https://www.Kejaksaan.go.id/unit\\_Kejaksaan.php?idu=24&idsu=16&idke=hal=1&id=4219&bc=](https://www.Kejaksaan.go.id/unit_Kejaksaan.php?idu=24&idsu=16&idke=hal=1&id=4219&bc=), diakses pada Kamis, 12 November 2020 Pukul 12.20 WIB
- KPK.go.id, “Capaian Kinerja KPK Tahun 2018”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/717-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2018>, diakses pada Kamis, 12 November 2020 Pukul 11.36 WIB
- KPK.go.id, “Laporan Tahunan KPK Tahun 2019”
- Mariam Webster, *English Dictionary*, article corrupt
- Mngafifi, “Beberapa Teori Dasar Tentang Korupsi”, <https://21ngafifi.wordpress.com/2010/10/25/beberapa-teori-dasar-tentang-korupsi/>, diakses pada Sabtu, 5 December 2020. Pukul 19.58 WIB
- MoU Antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan RI, dan Kepolisian Negara RI dengan No. SPJ-97/01-55/03/2017, No.KEP087/A/JA/03/2017, dan No.B/27/III/2017 Tentang Kerja Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Mumpuni, Ayu, “Dari ribuan laporan yang masuk, terdapat 771 perkara yang sudah diselesaikan Polri”, <https://www.alinea.id/nasional/polri-klaim-selamatkan-uang-hasil-korupsi-rp2-2-t-selama-2018-b1UB59fR2>, diakses pada Kamis, 12 November 2020 Pukul 11.47 WIB
- Perdana Putra, Nanda, “Sepanjang 2019, Polri Ungkap Sejumlah Kasus Korupsi dengan Total Nilai Rp 1,8 Triliun” <https://www.liputan6.com/news/read/4144012/sepanjang-2019-polri-ungkap-sejumlah-kasus-korupsi-dengan-total-nilai-rp-18-triliun>, diakses pada Sabtu 14 November 2020 pukul 06.59 WIB
- Pratama Taher, Andrian, “Catatan Kinerja KPK di 2017: Data Kasus dan Latar Belakang Koruptor”, <https://tirto.id/catatan-kinerja-kpk-di-2017-data-kasus-dan-latar-belakang-koruptor-cCn5>, diakses pada Kamis, 12 November 2020 Pukul 10.44 WIB
- Ramadhan Firdaus, Fahmi “Keberadaan KPK dalam Upaya Pemberantasan Korupsi” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ca466cb7f8ed/keberadaan-kpk-dalam-upaya-pemberantasan-korupsi/>, diakses pada 29 April 2020, pukul 22.38 WIB.
- Santoso, Audrey, “Polri Tangani 1.472 Kasus Korupsi Selama 2017, 1.028 Selesai”, <https://news.detik.com/berita/d-3790172/polri-tangani1472-kasus-korupsi-selama-2017-1028-selesai>, diakses Pada 11 November, Pukul 17.10 WIB
- Sanusi Putri, Riani, “Kejaksaan Agung Selamatkan Uang Negara Rp977 miliar dari Kasus Korupsi”, <https://nasional.tempo.co/read/1040582/Kejaksaan->

agung- selamatkan- uang-negara-rp977-miliar-dari-kasus-korupsi/full&view=ok,  
diakses pada Kamis, 12 November 2020 Pukul 10.31 WIB

*United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003

Utomo Saputra, Erandhi, "Setahun Lebih UU Baru KPK Berlaku, Perpres Supervisi  
Akhirnya Diterbitkan Jokowi",  
[https://kumparan.com/kumparannews/setahun-  
lebih-uu-baru-kpk-berlaku-perpres-supervisi-akhirnya-diterbitkan-jokowi-1uTgO7JIVd4/full](https://kumparan.com/kumparannews/setahun-lebih-uu-baru-kpk-berlaku-perpres-supervisi-akhirnya-diterbitkan-jokowi-1uTgO7JIVd4/full),  
diakses pada 14 Januari 2021, pukul 21.16 WIB

### **Wawancara**

Wawancara dengan Biro Hukum KPK, Andhi Kurniawan, melalui Zoom Meeting  
pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 15.00 WIB

Wawancara dengan Kepala Seksi Wilayah I Subdit Laporan Pengaduan Masyarakat  
(Lapdumas) pada Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung Republik  
Indonesia, Putri Ayu Wulandari di Gedung Bundar JAM Pidsus, pada  
tanggal 24 Maret 2021 pukul 10.49 WIB, Surat Perintah No. PRIN-  
67/F.1/Fs/03/2021